

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*Sejarah Sekadau Dari Masa Swapraja Sampai Terbentuknya Kabupaten Sekadau Tahun 1946-2003*”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah latar belakang terbentuknya pemerintahan swapraja di Sekadau, 2). Bagaimanakah perkembangan Sekadau dari masa swapraja sampai sebelum menjadi kabupaten, 3). Bagaimanakah sejarah terbentuknya Kabupaten Sekadau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Sekadau, pendidikan sejarah, Institut keguruan dan ilmu pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP-PGRI) Pontianak.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang ditulis dengan deskriptif analisis dengan langkah, yaitu 1). *Heuristik*, 2). *Verifikasi*, 3). *Interpretasi*, 4). *Historiografi*. Untuk memperoleh data-data penelitian menggunakan sumber primer, sekunder dan sejarah lisan.

Terbentuknya Swapraja Sekadau diawali dengan terbentuknya kerajaan Sekadau kemudian berkembang menjadi Swapraja Sekadau yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Mengalami perubahan pada masa kedudukan Jepang setelah berakhirnya kedudukan Jepang, Kalimantan Barat memulai babak baru. perkembangan Sekadau pada masa Swapraja kemudian menjadi Kewedanaan sampai terbagi menjadi beberapa kecamatan, pembentukan Sekadau sebagai kabupaten tidak serta merta berjalan dengan mudah, pada prosesnya perjalanan pemekaran Kabupaten Sekadau menemui permasalahan, dimulai dari tidak disetujuinya terbentuk Kabupaten Sekadau oleh pemerintah Kabupaten Sanggau sampai kekurangan dana kepanitian.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa di daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat pernah terbentuk dua belas swapraja dan tiga neo_swapraja dan Sekadau pernah menjadi Swapraja kemudian diganti menjadi Kewedanaan kemudian dibawah Kabupaten Sanggau, Sekadau menjadi kabupaten pada tahun 2003. Beberapa saran ingin peneliti sampaikan kepada para pembaca, sejarah akan memudar apabila ditelantarkan oleh karena itu peneliti sarankan agar arsip-arsip dan peninggalan sejarah lainnya agar tetap dijaga dan simpan oleh lembaga yang berkaitan agar arsip-arsip dan peninggalan lainnya tidak hilang ataupun rusak.